



TANTANGAN IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SGDs) DI INDONESIA

Mirna Amirya, Gugus Irianto

Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 165 Malang, 65145, Indonesia

mirna.amirya@ub.ac.id, gugusir@ub.ac.id

INFO ARTIKEL

JIAP Volume IX
Nomor 1
Halaman 187-198
Samata, Desember 2023

ISSN 2441-3017
e-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
7 Juli 2021
Tanggal Revisi:
30 Juni 2023
Tanggal Diterima:
30 Juni 2023

ABSTRAK

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mencerminkan tujuan pembangunan yang ambisius dengan visi transformatif. Agenda pembangunan baru menciptakan kerangka pembangunan holistik. Para ahli memperkirakan agenda baru itu bisa berhasil. SDGs membawa peluang besar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, tetapi juga tantangan besar. Studi ini mengeksplorasi tantangan utama implementasi SDGs di Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian literatur. Data sekunder yang digunakan berupa jurnal-jurnal penelitian yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tantangan dalam implementasi SDGs. Hasilnya menyajikan beberapa tantangan yaitu Pertama, Penyelarasan SDGs dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Kedua, Peningkatan koordinasi vertikal dan horisontal; dan Ketiga, Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan. Implikasi penelitian ini membantu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman berbagai pihak yang berkepentingan terkait implementasi SDGs dan tantangannya di Indonesia serta memitigasi tantangan-tantangan tersebut.

Kata Kunci: Rencana pembangunan, Tantangan implementasi, Pemerintah Indonesia, SDGs

The Sustainable Development Goals (SDGs) reflect ambitious development goals with a transformative vision. A new development agenda creates a holistic development framework. Experts predict the new agenda could be successful. The SDGs bring great opportunities for developing countries, including Indonesia, but also great challenges. This study explores key challenges of implementing the SDGs in Indonesia. Data collection techniques using literature review. The secondary data are used in the form of relevant research journals. Analysis was conducted by identifying challenges in implementing the SDGs. The results present several challenges, namely First, Aligning the SDGs with national and regional development planning, Second, Increasing vertical and horizontal coordination; and Third, Increasing stakeholder participation. The implications of this research help to increase awareness and understanding of various interested parties regarding the implementation of the SDGs and their challenges in Indonesia and mitigate these challenges.

Keywords : *Development plans, Implementation challenges, Indonesia Government, SDGs*

Copyright: Amirya, Mirna. Gugus Irianto. (2023). Tantangan Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. 9 No. 1 (187-198). <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38916>

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya disebut SDGs) mencerminkan tujuan pembangunan yang ambisius dengan visi transformatif, yang didukung oleh masing-masing dari 193 Negara Anggota PBB. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa SDGs membawa peluang besar dan tantangan besar bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia khususnya Indonesia. Meskipun SDG mencerminkan konsensus global tentang “masa depan yang diinginkan“, SDGs telah diadopsi pada saat yang penuh tantangan. Perekonomian global sedang mengalami pemulihan yang lambat dan tidak merata pasca Covid-19 (Habibi & Pratama, 2021).

Para ahli meramalkan bahwa SDGs dapat mencapai lebih dari Millenium Development Goals (MDGs). SDGs didasarkan pada MDGs, kemudian dikembangkan kembali dan ditingkatkan, dengan upaya khusus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan MDGs. Selanjutnya, SDGs dirumuskan menjadi agenda pembangunan 2030 yang lebih komprehensif dengan tujuan utamanya yaitu mempromosikan hak atas pembangunan yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Agenda 2030 menyatakan untuk mewakili visi yang “sangat ambisius dan transformasional“ (UN, 2015, paragraf 7). Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam implementasi SDGs, dengan melibatkan kontribusi entitas pemerintah dan non-pemerintah dalam agenda global ini. Namun, ketika Indonesia mulai mengimplementasikan SDGs, ada tantangan yang dihadapinya. Beberapa penelitian sebelumnya meneliti di negara-negara berkembang dan penelitian di Indonesia masih terbatas (Bhattacharya, et al., 2016). Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi dan merangkum tantangan utama implementasi SDGs di Indonesia.

Agenda SDGs telah dirumuskan pada tingkat global melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015. Agenda tersebut mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk termasuk penghapusan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 (lima) prinsip dasar yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership* dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras (Mutiarani & Siswantoro, 2020).

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*SDGs* terdiri dari **17 Tujuan** dan **169 Target** yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi, sebagaimana ditunjukkan Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tujuan SDGs dan Pilar-pilar

No	Goal SDGs	Pilar
1	<i>No Poverty</i>	Sosial
2	<i>Zero Hunger</i>	Sosial
3	<i>Good Health and Well-Being</i>	Sosial
4	<i>Quality Education</i>	Sosial
5	<i>Gender Equality</i>	Sosial
6	<i>Clean Water and Sanitation</i>	Lingkungan
7	<i>Affordable Energy</i>	Ekonomi
8	<i>Decent Work and Economic Growth</i>	Ekonomi
9	<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>	Ekonomi
10	<i>Reduced and Inequalities</i>	Ekonomi
11	<i>Sustainable Cities and Communities</i>	Lingkungan
12	<i>Responsible Consumption and Production</i>	Lingkungan
13	<i>Climate Action</i>	Lingkungan
14	<i>Life Below Water</i>	Lingkungan
15	<i>Life on Land</i>	Lingkungan
16	<i>Peace, Justice, and Strong Institution</i>	Hukum dan Tata Kelola
17	<i>Partnership for the Goals</i>	Ekonomi

Sumber: *Sustainable Development Goals*. Available at <https://www.undp.org/sustainable-development-goals> (Diakses tanggal 01 Maret 2023).

SDGs merupakan pembangunan yang bersifat universal dan inklusif. Universal karena tidak hanya dilaksanakan oleh negara kurang berkembang namun juga negara maju untuk seluruh bangsa dunia. Inklusif, artinya manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh segala lapisan dan kelompok masyarakat meliputi masyarakat rentan/miskin, disabilitas, anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki.

Penetapan tujuan dan target dalam SDGs mempunyai keterkaitan yang komprehensif antar pilarnya yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum tata kelola. Tujuan akhir yang diharapkan dalam pencapaian SDGs yaitu: menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan berkurangnya kesenjangan. Untuk mempercepat pencapaian tujuan akhir tersebut terdapat tujuan-tujuan yang menjadi akselerasi/pemercepat yaitu kehidupan sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kota pemukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim serta perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Sedangkan tujuan-tujuan yang lain merupakan katalisator/daya ungkit yaitu: air bersih dan

sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, industri inovasi dan infrastruktur, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab ekosistem lautan, ekosistem daratan dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

Inklusif yaitu tidak hanya dimaknai dari sisi penerima manfaat pembangunan, namun dimaknai juga bagi pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dalam mewujudkan SDGs bukan hanya pemerintah (eksekutif dan legislatif) namun juga melibatkan filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar, organisasi masyarakat sipil bahkan media. Setiap unsur tersebut memiliki peran masing-masing namun saling terkait. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang mendukung pencapaian target SDGs. Organisasi masyarakat sipil memberikan advokasi, membangun kesadaran masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian target SDGs. Filantropi dan pelaku usaha berperan untuk melakukan advokasi kepada para pelaku usaha dan sektor bisnis. Peran akademisi bertumpu pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mengupayakan terwujudnya pencapaian SDGs.

SDGs merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja, sehingga perlu peran serta aktif seluruh pihak dalam fasilitasi, koordinasi, advokasi, sosialisasi dan diseminasi guna mewujudkan sinergitas pencapaian SDGs. Pembagian pola peran menjadi sangat penting dalam pelaksanaan SDGs, demikian halnya dengan pembiayaan yang dialokasikan untuk perwujudan pencapaian SDGs yang tidak hanya bersumber dari APBD namun juga sumber lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menyediakan data deskriptif, berupa kata-kata atau naskah, tentang sesuatu yang diamati di lapangan. Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, jurnal dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data diperoleh melalui proses yang disebut pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *literatur review*. Analisis data dilakukan dengan mengkaji temuan dari jurnal dan literatur mengenai tantangan pencapaian SDGs baik di Indonesia maupun di negara-negara berkembang. Selanjutnya dinarasikan dalam laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil identifikasi dan rangkuman tantangan implementasi SDGs di Indonesia. Terdapat tiga tantangan utama yaitu Penyelarasan SDGs dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,

Peningkatan koordinasi vertikal dan horisontal, dan Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan.

Penyelarasan SDGs dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Negara, dalam hal ini Pemerintah, memimpin implementasi SDGs. Prioritas pembangunan memberikan landasan untuk mencapai SDGs serta visi nasional dan daerah (LEAD, 2015). Oleh karena itu, rencana pembangunan nasional harus sesuai dengan agenda global. Namun, upaya mengintegrasikan Agenda 2030 ke dalam rencana nasional dan daerah menjadi salah satu tantangan utama (UNDG, 2015; UNSTT, 2012; National Development Planning Commission, 2015; Lucci, Surasky & Gamba, 2015; UNDP, 2015).

Indonesia berupaya untuk menginternalisasi SDGs ini ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Tantangan utama yang dihadapi adalah menerjemahkan tujuan global ke dalam konteks nasional dan daerah. Indonesia perlu merancang strategi pembangunan nasional yang secara eksplisit berorientasi pada pencapaian SDGs, yang membantu mencapai tujuan global. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan bahwa SDGs diintegrasikan ke dalam proses perencanaan nasionalnya.

Tugas pertama adalah menerjemahkan agenda global ke dalam rencana nasional yang praktis dan dapat dilaksanakan agar selaras dengan perencanaan pembangunan Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah merumuskan rencana nasional dan daerah dengan mempertimbangkan SDGs. Indonesia berupaya mengintegrasikan indikator-indikator SDGs dengan melakukan pemetaan indikator-indikator nasional dan daerah. Indonesia mulai menilai sejauh mana SDGs telah diarusutamakan ke dalam rencana nasional dan daerah. Sebagai tinjauan awal, misalnya, pencapaian beberapa target dari 169 target SDGs telah tercermin dalam rencana pembangunan nasionalnya. Indonesia melakukan penilaian keselarasan indikator kinerja utama dalam rencana nasionalnya dengan SDG. Selain itu, sebagai bentuk komitmen terhadap SDGs, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Undang-undang ini bertujuan untuk menyatukan perencanaan di tingkat nasional dan daerah serta membuat basis data terpadu.

Namun, memasukkan SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional saja tidak akan cukup. SDGs juga harus dimasukkan ke dalam rencana pembangunan daerah. Untuk tujuan ini, negara dapat mengembangkan rencana pembangunan berkelanjutan nasional mereka sendiri yang menyoroti pertimbangan yang relevan di negara mereka, termasuk prioritas dan tantangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia dituntut untuk mampu menyusun strategi pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka prioritas

kebijakan multi-pemangku kepentingan (*multi stakeholders*) yang dirancang untuk mengevaluasi keterkaitan sistemik di antara isu-isu pembangunan berkelanjutan. Rencana pembangunan berkelanjutan nasional dapat dijadikan sebagai pedoman untuk merumuskan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian SDGs global.

Dalam integrasi SDGs global ke SDGs nasional dan daerah, Indonesia juga menghadapi tantangan prioritas. Indonesia dapat memilih target yang paling relevan untuk mencapai tujuan nasional dan daerahnya. Tujuan prioritas adalah untuk mencapai pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing negara. Untuk mempercepat kemajuan, negara perlu mengidentifikasi bidang kebijakan yang paling penting bagi mereka (Gable, Lofgren & Rodarte 2014).

Memprioritaskan SDGs di tingkat negara akan menimbulkan beberapa tantangan. Pemerintah, misalnya, dapat memilih untuk memprioritaskan bidang tematik di mana mereka telah bekerja dengan baik untuk mencapai hasil yang cepat. Namun juga perlu memprioritaskan bidang-bidang dengan kinerja yang lemah untuk menghasilkan pembangunan yang lebih seimbang (Bhattacharya et al., 2016). Sebagai contoh, pencapaian pengentasan kemiskinan melalui pengurangan kelaparan dan kesenjangan gender terkait akses ke pendidikan cukup baik. Namun demikian, bidang lain seperti lapangan kerja (ketenagakerjaan), kelestarian lingkungan, kesehatan masih memerlukan perhatian yang cukup besar untuk mencapai kemajuan yang berarti.

Selain itu, Indonesia perlu untuk menimbang sinergi relatif dan pertukaran antara target SDGs. Misalnya, kemajuan dalam pengentasan kemiskinan (SDG1) tidak dapat dicapai tanpa juga menangani ketahanan pangan (SDG2) dan kebijakan ekonomi makro untuk mempromosikan kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak (SDG8). Keberhasilan di bidang ini juga akan menghasilkan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik (SDG3). Trade-off juga dimungkinkan. Misalnya, peningkatan penggunaan lahan pertanian untuk membantu mengakhiri kelaparan dapat mengurangi keanekaragaman hayati, penggunaan yang berlebihan dan mencemari sumber daya air, dan berdampak negatif pada sumber daya laut – yang semuanya pada akhirnya dapat memperburuk ketahanan pangan (ICSU, ISSC 2015). Demikian pula, peningkatan industrialisasi dapat menciptakan lapangan kerja tetapi juga tidak diragukan lagi mengarah pada peningkatan emisi karbon dioksida, yang dapat berkontribusi pada perubahan iklim (Bhattacharya, et al., 2016).

Tantangan besar lainnya setelah indikator SDGs diselesaikan, Indonesia perlu secara hati-hati membandingkan agenda global dengan tujuan nasional dan daerah mereka untuk menetapkan target yang dapat dicapai. Indonesia dapat mengadakan konsultasi nasional dengan para pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu terkait pengembangan

indikator nasional dan daerah. Indonesia harus mengidentifikasi prioritas mereka sendiri melalui kolaborasi dan dialog di dalam dan di antara pemerintah dan kelompok pemangku kepentingan (Bizikova, Swanson & Searcy, 2015). Hal ini dapat dicapai dengan melembagakan proses prioritas nasional yang efektif yang mempertimbangkan pertukaran kebijakan yang sulit dalam kendala pembiayaan (Akhtar, 2015).

Peningkatan Koordinasi Vertikal dan Horisontal

Menerapkan agenda seluas dan terpadu seperti SDGs akan membutuhkan koordinasi antar kementerian di tingkat nasional dan unit kerja atau departemen pemerintah di tingkat daerah. Penting juga untuk mengidentifikasi lembaga terkemuka dengan wewenang dan kapasitas untuk mengatur tindakan yang lancar dan terintegrasi di antara para aktor pemerintah. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa upaya pembangunan nasional mendapat manfaat dari koordinasi oleh badan perencanaan pusat, seperti kantor perdana menteri atau yang setara (Olsen et al., 2014).

Koordinasi di antara berbagai tingkat pemerintahan akan sama pentingnya. Dengan pendekatan “tidak ada yang tertinggal”, agenda 2030 bertujuan untuk mencakup semua kelompok populasi di setiap negara (UN, 2015, para. 4). Pemerintah daerah merupakan tingkat administrasi yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peran kunci. Pemerintah daerah yang kuat, berdedikasi untuk mencapai SDGs dan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menciptakan rasa memiliki di antara masyarakat.

SDGs memiliki banyak tujuan yang berdiri sendiri yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kementerian dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, umumnya terdapat koordinasi yang lemah secara keseluruhan di antara badan-badan pelaksana. Memecahkan satu masalah pembangunan sering kali menciptakan masalah lain. Tujuh belas (17) tujuan SDGs saling terkait jauh lebih erat sehingga perlu koordinasi intra pemerintah yang kuat. Misalnya, SDG2, yang berfokus pada kelaparan dan produksi pangan berkelanjutan, juga mempromosikan sistem pertanian. Di sini kita melihat bagaimana ketahanan terhadap perubahan iklim dapat membantu mencapai target terkait kelaparan (Bizikova, Swanson & Searcy 2015). Agenda terpadu seperti itu membutuhkan pendekatan implementasi yang sama terpadunya, yang didasarkan pada koordinasi antar pemerintah yang solid. Tindakan terkoordinasi dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten akan diperlukan (LEAD, 2015). Untuk mencapai koordinasi tersebut, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk membentuk proses atau mekanisme antar kementerian (CBD, 2015) untuk mempertemukan perwakilan dari semua kementerian dan departemen terkait. Misalnya, membentuk komite tingkat tinggi untuk memimpin implementasi SDG. Komite diketuai oleh Kementerian perencanaan pembangunan nasional

(Bappenas) dengan dukungan kementerian lintas pemerintah dan sektor lain bertugas menganalisis kesenjangan implementasi SDGs (Steven, 2015) serta memastikan koordinasi dan kerja sama yang lebih besar antara lembaga pemerintah dan kelompok sektoral untuk mengimplementasikan SDGs (National Development Planning Commission, 2015).

Memetakan secara rinci SDGs dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya dapat membantu upaya koordinasi. Indonesia dapat mengidentifikasi kementerian-kementerian utama serta kementerian-kementerian dan divisi-divisi yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan setiap target. Draf dokumen hasil dapat diedarkan ke kementerian lain untuk dikomentari (GED, 2016). Upaya ini perlu dilakukan untuk membantu menciptakan pembagian kerja yang jelas antar kementerian dan menyederhanakan koordinasi di antara mereka sendiri.

Selain itu, sebagian besar literatur mempromosikan integrasi tidak hanya di antara kementerian nasional tetapi juga antara pemerintah pusat dan daerah (Convention of Biological Diversity (CBD), 2015; LEAD, 2015; Olsen et al., 2014). Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam implementasi SDGs. Tindakan terkoordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten menjadi perhatian utama di negara berkembang (LEAD, 2015), termasuk di Indonesia. Pemerintah daerah di Indonesia perlu untuk terus berkoordinasi dengan aktor pemerintah pusat dan non-pemerintah.

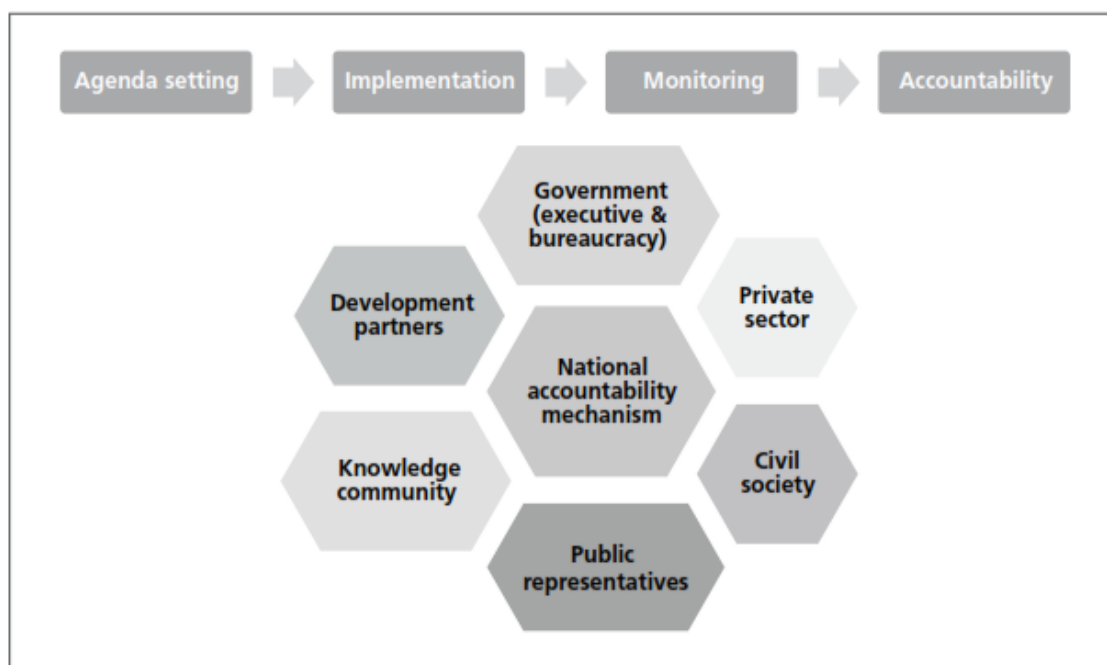
Secara keseluruhan, mekanisme koordinasi untuk implementasi SDGs sangat penting untuk dibentuk di berbagai tingkat pemerintahan. Harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara lembaga pelaksana yang berbeda. Pemerintah daerah dan pusat harus memiliki saluran komunikasi yang jelas sehingga tindakan dan informasi dapat mengalir dua arah. Akhirnya, juga harus ada organ pemerintah yang ditunjuk yang bertindak sebagai saluran antara entitas pemerintah dan non-pemerintah, untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan lainnya dapat berkontribusi dan bekerja sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi vertikal antara berbagai tingkat pemerintahan akan sangat penting untuk menghubungkan visi nasional dengan visi daerah (Olsen et al., 2014). Begitupun juga dengan integrasi horisontal antar unit departemen di internal pemerintahan.

Peningkatan Partisipasi Pemangku Kepentingan

SDGs bersifat inklusif, artinya membutuhkan partisipasi aktif semua orang dalam proses kebijakan, serta memiliki kemampuan untuk menuntut tindakan korektif dari para pengambil keputusan baik di pemerintahan maupun di parlemen (UNDG, 2014). Pencapaian SDGs membutuhkan mekanisme kelembagaan yang kuat dan efektif dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari sektor publik, pemerintah, LSM/*Civil Society Organization* (CSO), sektor swasta,

akademisi, LSM internasional, mitra pembangunan, dan masyarakat umum. Pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam setiap langkah implementasi SDG, mulai dari penetapan agenda hingga memastikan akuntabilitas (lihat Gambar 1). Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, setiap pemangku kepentingan harus berpartisipasi dalam mekanisme pemantauan dan peninjauan nasional. Kemitraan global dan partisipasi pemangku kepentingan seperti itu dapat ditemukan khususnya di SDG17.

Gambar 1. Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Implementasi SDG



Sumber: Bhattacharya et al. (2016)

Saat ini, selain sektor publik, keterlibatan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan implementasi SDG masih belum memadai di negara berkembang. Selain itu, pengetahuan tentang SDGs masih terbatas di kalangan pemangku kepentingan, bahkan di tingkat pemerintah (termasuk pemerintah daerah dan masyarakat) (Bhattacharya et al., 2016). Sektor swasta, masyarakat sipil, dan LSM diharapkan lebih aktif dalam implementasi SDG. Sektor swasta memiliki peran investasi yang penting dalam membantu mengisi kesenjangan yang teridentifikasi dalam pembiayaan implementasi SDGs. Dalam SDGs, sektor swasta dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kelestarian lingkungan. Masyarakat sipil juga memainkan peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah merumuskan SDGs di tingkat global meskipun peluangnya masih terbatas untuk terlibat dalam proses prioritas, implementasi, pemantauan dan evaluasi SDGs.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia menghadapi beberapa tantangan untuk mengimplementasikan SDGs, yaitu Pertama, Penyelarasan SDGs dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah; Kedua, Peningkatan koordinasi vertikal dan horizontal dengan membentuk mekanisme koordinasi kelembagaan antara berbagai tingkat pemerintahan; dan Ketiga, Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dengan mendorong kemitraan dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Implikasi penelitian ini membantu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman berbagai pihak yang berkepentingan terkait implementasi SDGs dan tantangannya di Indonesia serta memitigasi tantangan-tantangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, S. (2015). *Transformation for SDG Implementation in Asia and the Pacific*. Speech delivered at the session on, Post-2015 Sustainable Development Agenda, Sustainable Development Goals & Environmental Sustainability in Asia-Pacific' during the First Forum of Ministers and Environmental Authorities of Asia Pacific in Bangkok, Thailand. Available at <http://www.unescap.org/speeches/transformation-sdg-implementation-asia-and-pacific> (accessed on 01 March 2023).
- Bhattacharya, D., Khan, T. I., Rezvana, U. S., & Mostaque, L. (2016). *Moving forward with the SDGs: Implementation challenges in developing countries*. Technical Report.
- Bizikova, L., Swanson, D., & Searcy, C. (2015). *Implementing the Sustainable Development Goals at Home. Commentary*. IISD. Available at <http://www.iisd.org/commentary/implementing-sustainable-development-goals-home> (accessed on 01 March 2023).
- CBD. (2015). *Lessons from the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020*. Available at: <http://sd.iisd.org/policy-updates/living-in-harmony-with-nature-to-transform-our-world-the-cbds-contribution-to-sdg-implementation/> (accessed on 01 March 2023).
- Gable, S., Iofgren, H., & Osorio-Rodarte, I. (2014). *The Post-2015 Global Agenda: A Framework for Country Diagnostics*. Development Prospects Group. World Bank. Available at ubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2014/10/303491412887765048/ThePost2015GlobalAgendaAFrameworkForCountryDiagnostics.pdf (accessed on 01 March 2023).
- General Economics Division Bangladesh. (2016). *Mapping of Ministries/Divisions by SDGs and Corresponding Target*. [Draft].

- Available at www.minland.gov.bd/uploaded/documents/11/7015110e-f354-4e18-bd71-7006db4de0bb.docx (accessed on 01 March 2023).
- Habibi, M., & Pratama, D., A. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap capaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 68-80. DOI: <https://doi.org/10.54144/govsci.v2i2.15>
- ICSU, ISSC. (2015). *Review of the Sustainable Development Goals: The Science Perspective*. Paris: International Council for Science (ICSU).
- Lead Pakistan. (2015). *Translating Sustainable Development Goals (SDGs) at the National Level*. Policy note. Available at: [www.lead.org.pk/lead/Uploaded_images/Events/Policy%20Note%20-%20Translating%20Sustainable%20Development%20Goals%20\(SDGs\)%20at%20the%20National%20Level.pdf](http://www.lead.org.pk/lead/Uploaded_images/Events/Policy%20Note%20-%20Translating%20Sustainable%20Development%20Goals%20(SDGs)%20at%20the%20National%20Level.pdf) (accessed on 01 March 2023).
- Lucci, P., Surasky, J., & Gamba, C. (2015): *Getting ready for SDG implementation in Latin America: The example of Colombia*. Overseas Development Institute (ODI) and Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI). Available at: <http://cepei.org/wp-content/uploads/2015/10/Getting-ready-for-SDG-implementation-in-Latin-America.pdf> (accessed on 01 March 2023).
- Mutiarani., N., D, & Siswanto, D. 2020. The Impact of Local Government Characteristics on The Accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs), *Cogent Business and Management*, 7(1), 1-11.
- National Development Planning Commission Ghana. (2015). *Ghana and the Sustainable Development Goals (SDGs)*. Available at: <https://s3.amazonaws.com/ndpc-static/CACHES/PUBLICATIONS/2015/07/28//Ghana+and+Post+2015+SDGs.pdf> (accessed on 01 March 2023).
- Olsen, H., I., et al. (2014): *Implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): An Assessment of the Means of Implementation (MOI)*. Available at: http://www.iges.or.jp/isap/2014/PDF/IPSS_SDGs_conference_paper.pdf (accessed on 01 March 2023).
- Steven, D. (2015). *From Declaration to Delivery: Actioning the Post-2015 Agenda*. Available at: http://cic.nyu.edu/sites/default/files/publication_steven_declaration_delivery_jun2015.pdf (accessed on 01 March 2023).
- UN Development Group. (2014). *Delivering The Post-2015 Development Agenda: Opportunities At The National And Local Levels*. Available at: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1909UNDP-MDG-Delivering-Post2015-Report-2014.pdf> (accessed on 01 March 2023).

- UN. (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Outcome Document for the United Nations Summit to Adopt the Post-2015 Development Agenda. Available at: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (accessed on 01 March 2023).
- UN Development Group. (2015). *Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development: interim reference guide to UN country teams*. Available at: <http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9478undgguidancenote.pdf> (accessed on 01 March 2023).
- UNDP. (2015): *Piloting the Mainstreaming of 2030 Agenda*. Available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhrJWu2ODLAhXFAJoKHSVLDG4QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fundg.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2FMainstreaming_pilot-COs-activities-21-Dec-15.docx&usg=AFQjCNHP3QXQpC9nPYENqfXEn-Zb7dSRPg&sig2=KuaXZQiaEAYjF1ctuyMrxw&bvm=bv.117868183,d.bGs (accessed on 01 March 2023).
- UN System Task Team. (2012). *Review of the contributions of the MDG Agenda to foster development: Lessons for the post-2015 UN development agenda*. Discussion Note. Available at: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg_assessment_Aug.pdf (accessed on 01 March 2023).
- United Nations (UN). (2023). *Sustainable Development Goals*. Available at: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals> (accessed on 01 Maret 2023).